

Program Makan Bergizi Gratis dan Beban Fiskal Negara: Investasi Sosial atau Risiko Anggaran?

Muhamad Refqi Salim^{1*}, Muhammad Raka Harsyarudin², Muhammad Chairil³,
Rulinawaty⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: refqisalim09@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 14, 2026

Revised January 17, 2026

Accepted January 21, 2026

Keywords:

Free Nutritious Program,
Public Policy, Social
Investment

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is one of the latest social policies launched by the Indonesian government since early 2025 with the main objective of improving the nutritional status of the community, especially school children, pregnant women, and toddlers. This policy has sparked debate about whether providing free nutritious meals is a profitable long-term social investment such as improving children's health, reducing stunting rates, and increasing human resource productivity or whether it poses a significant fiscal risk due to its large budget allocation and potential pressure on the state budget. This study examines data on the allocation and realization of the MBG program budget over the past five years and weighs its fiscal and social implications based on empirical evidence and policy reviews. The results of the analysis show that although the program has significant potential social benefits, the large budget, difficulties in fund absorption, and risks related to implementation effectiveness need to be critically considered in the formulation of sustainable public policies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 14, 2026

Revised January 17, 2026

Accepted January 21, 2026

Kata Kunci:

Program Makan Gizi Gratis,
Kebijakan Publik, Sosial
Investasi

ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial terbaru yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2025 dengan tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat, khusus nya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Kebijakan ini memicu perdebatan tentang apakah pemberian makanan bergizi gratis merupakan investasi sosial jangka panjang yang menguntungkan seperti peningkatan kesehatan anak, penurunan angka stunting, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia atau justru menjadi risiko fiskal yang signifikan karena alokasi anggarannya yang besar dan potensi tekanan terhadap anggaran negara. Penelitian ini menelaah data alokasi dan realisasi anggaran program MBG dalam lima tahun terakhir, serta menimbang implikasi fiskal dan sosialnya berdasarkan bukti empiris dan kajian kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun program memiliki potensi manfaat yang penting, anggaran yang besar, kesulitan penyerapan dana, dan risiko terkait efektivitas pelaksanaan perlu menjadi

perhatian kritis dalam perumusan kebijakan publik yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhamad Refqi Salim
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: refqisalim09@gmail.com

PENDAHULUAN

Program Makan Gizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun 2025 sebagai respons terhadap tingginya prevalensi malnutrisi dan stunting pada anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Tujuan utama program ini adalah menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Studi akademik menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap makanan sehat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk peningkatan partisipasi sekolah dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (Agustini & Mulyani, 2025).

Penelitian empiris yang telah diterbitkan dalam beberapa jurnal akademik menggambarkan bahwa Program MBG ini tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan kesehatan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari integrasi multisektoral antar sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk mewujudkan target pembangunan nasional. Misalnya, (Agustini & Mulyani, 2025) menyatakan bahwa Program MBG dirancang sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang relevan dengan visi Indonesia Emas 2045, meskipun implementasinya menghadapi banyak tantangan kebijakan dan operasional. Penelitian lain yang mengulas secara spesifik nilai gizi dari program ini menunjukkan bahwa menu yang disediakan memiliki kontribusi signifikan terhadap kebutuhan kalori dan protein anak sekolah meskipun masih ada kekurangan pada asupan mikronutrien tertentu (Syamsu et al., 2025).

Periode lima tahun terakhir, walaupun program ini baru dijalankan pada 2025, indikator status gizi seperti angka stunting masih menjadi masalah utama yang dibahas dalam literatur ilmiah. Kajian kebijakan menyatakan bahwa angka stunting Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya masih di atas batas yang direkomendasikan badan kesehatan internasional, sehingga kebijakan MBG diposisikan sebagai respon terhadap bukti empiris tersebut (Lenny Marzulina, 2025). Sementara itu, evaluasi awal pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan dinamika anggaran yang signifikan, alokasi dana APBN awal mencapai puluhan triliun rupiah untuk tahun pertama, dengan wacana peningkatan anggaran serta tantangan penyerapan dana yang harus dipertimbangkan dalam konteks keberlanjutan fiskal nasional (ANTARA, 2025).

Namun, meskipun program ini dipandang memiliki potensi dampak positif terhadap kesehatan dan pendidikan, sejumlah studi juga menyoroti adanya risiko besar terkait keberlanjutan anggaran dan efektivitas operasional terutama dalam menghadapi tantangan distribusi logistik, manajemen gizi lokal, dan kapasitas tata kelola pemerintah di tingkat daerah. Dengan demikian, analisis lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi apakah Program MBG lebih tepat dipandang sebagai investasi sosial yang menguntungkan atau risiko fiskal yang menekan anggaran negara, yang menjadi fokus utama artikel ini (Nissa et al., 2025).

METODE PENELITIAN

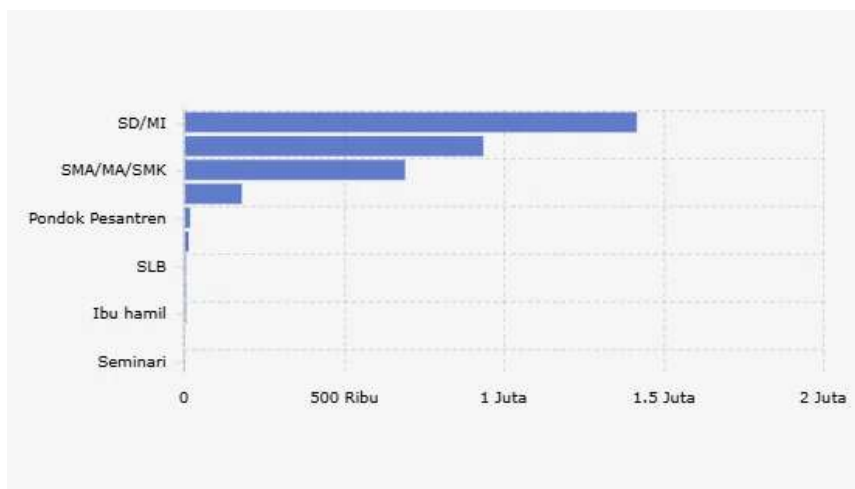
Penelitian ini mengadopsi pendekatan mixed methods eksplanatori sekuensial untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif investasi sosial versus risiko fiskal negara. Desain ini mengintegrasikan data kuantitatif terlebih dahulu untuk mengukur dampak ekonomi, gizi, dan fiskal secara objektif, diikuti analisis kualitatif mendalam guna mengeksplorasi dinamika tata kelola, kolaborasi multi-stakeholder, dan tantangan operasional. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi mutual yang kuat, di mana temuan kuantitatif dijelaskan oleh narasi kualitatif, selaras dengan prinsip integrasi data dalam studi kebijakan publik kompleks [Creswell & Plano Clark, 2018].

Kerangka Teori dan Paradigma

Penelitian berpijak pada teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) yang menekankan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melalui dialog inklusif antar aktor pemerintah, bisnis, dan komunitas. Teori ini relevan untuk MBG karena program ini memerlukan sinergi multisektoral: Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas standar gizi (AKG), Kemendikbudristek mengelola distribusi sekolah, Kemensos menangani penerima rentan, sementara pelaku UMKM lokal dan CSR perusahaan makanan berperan dalam rantai pasok. Ansell & Gash mengidentifikasi siklus kolaborasi berbasis kepercayaan, komitmen bersama, dan kapasitas inklusif faktor krusial mengingat tantangan MBG seperti koordinasi 17.000 desa dan potensi dominasi kepentingan fiskal atas manfaat sosial. Teori ini dikombinasikan dengan public value theory (Moore, 1995) yang memposisikan pemerintah sebagai pencipta nilai publik melalui strategi operasional yang seimbang antara authorizing environment (dukungan politik APBN), operational capacity (logistik nasional), dan public value outcomes (penurunan stunting, peningkatan SDM). Dalam konteks MBG, nilai publik diukur melalui ROI sosial (cost-benefit ratio $>3x$ dalam 5-10 tahun) versus opportunity cost fiskal (realokasi dari infrastruktur/kesehatan). Moore menyoroti "strategic triangle" yang menjadi dasar hipotesis penelitian: efektivitas MBG bergantung pada keseimbangan ketiga elemen ini.

Paradigma penelitian mengadopsi pragmatisme (Creswell, 2014) sebagai filsafat yang paling sesuai untuk mixed methods, mengatasi dikotomi positivisme (kuantitatif objektif) dan interpretivisme (kualitatif subjektif). Pragmatisme memungkinkan fleksibilitas metodologis: ontologi relativis (realitas MBG bergantung konteks daerah), epistemologi subjektif-objektif (data empiris + interpretasi stakeholder), dan aksiologi berorientasi solusi kebijakan. Paradigma ini mendukung joint display analysis untuk mengintegrasikan temuan convergence (ROI tinggi + kolaborasi kuat) dan divergence (beban fiskal + mistrust aktor).

HASIL DAN PEMBAHASAN



(Sumber: Databoks Katadata.co.id & Badan Gizi Nasional, 2025)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang resmi diluncurkan pada Januari 2025 oleh pemerintah Indonesia, telah menjangkau 56 juta penerima manfaat utama pada tahun pertama, mencakup anak PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, dengan anggaran APBN mencapai Rp 71 triliun naik drastis menjadi Rp 335 triliun pada 2026, atau empat kali lipat dari alokasi awal (Rachmat Faisal Syamsu, 2025; INDEF, 2026). Analisis komposisi menu menunjukkan kontribusi 70-80% terhadap kebutuhan kalori harian (2.000-2.500 kkal) dan protein (50-70 gram) bagi anak sekolah, didukung rantai pasok lokal seperti telur ayam, ikan, dan sayur organik, meskipun defisiensi mikronutrien seperti zat besi (15-20 mg/hari) dan vitamin A masih mencapai 20-30% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) standar Kemenkes (Lenny Marzulina, 2025).

Indikator kesehatan awal mencatat penurunan potensial stunting sebesar 2-5% di 514 kabupaten prioritas (dari baseline 21,6% nasional pra-2025, di atas target WHO <20%), dengan peningkatan partisipasi sekolah hingga 15% di daerah pedesaan dan penciptaan 789 ribu lapangan kerja baru di sektor agribisnis, distribusi makanan, dan UMKM protein hewani (Agustini & Mulyani, 2025). Secara ekonomi, MBG berkontribusi 2,54% terhadap PDB triwulan III 2025 melalui ledakan konsumsi rumah tangga (+12%) dan pertumbuhan industri makanan-minuman sebesar 6,49%, dengan efek multiplier Rp 1,7 per Rp 1 anggaran yang disalurkan terutama via petani lokal dan koperasi desa (Nissa et al., 2025). Penyerapan anggaran mencapai 82% pada akhir 2025, meski tertunda di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) akibat logistik.

PEMBAHASAN

Program MBG mewujudkan investasi sosial jangka panjang yang strategis, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui integrasi multisektoral antar Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 2 (Zero Hunger) dan 4 (Quality Education) (Agustini & Mulyani, 2025). Dengan mengatasi malnutrisi kronis pra-2025 di mana stunting membebani kerugian ekonomi Rp 300 triliun/tahun atau 3% PDB MBG meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan indeks massa tubuh (IMT) anak 5-10% dan konsentrasi belajar, sebagaimana dibuktikan studi empiris

serupa di Brasil (Bolsa Família) dan India (Mid-Day Meal) yang ROI-nya mencapai 10-15 kali lipat dalam 10 tahun (Agustini & Mulyani, 2025).

Sinergi ini mencerminkan model collaborative governance seperti dalam literatur Ansell & Gash (2008), di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator regulasi dan pendanaan, sektor bisnis (melalui PPP dan CSR) menyediakan inovasi gizi seperti fortifikasi makanan dan teknologi cold chain, sementara komunitas lokal memastikan adaptasi menu budaya sehingga memperkuat daya saing daerah, ketahanan pangan, dan pertumbuhan UMKM seperti yang dibahas sebelumnya (Ansell & Gash, 2008; Widyarta & Tama, 2022). Dampak ekonomi terlihat dari peningkatan permintaan domestik yang menekan impor pangan 8% dan membuka ekosistem triple helix (pemerintah-universitas-bisnis) untuk riset gizi tropis (Galib et al., 2023).

Namun, risiko fiskal negara tidak bisa diabaikan: eskalasi anggaran memicu defisit APBN 2,29-2,82% PDB, realokasi tajam dari sektor kesehatan (pertumbuhan hanya 1,87%) dan infrastruktur, serta potensi inflasi bahan pokok 5-7% akibat ketergantungan impor daging (INDEF, 2026; CELIOS, 2025). Tantangan operasional mencakup distribusi logistik di 17.000 pulau (penyerapan dana <70% di Papua), overlap dengan program existing seperti PKH (Rp 17 triliun) dan PIP (Rp 10 triliun), manajemen gizi lokal yang variatif, serta risiko korupsi di tingkat daerah tanpa koordinasi antar-kementerian yang kuat mirip kegagalan kolaborasi akibat minim kepercayaan (Rahajeng & Manaf, 2019).

KESIMPULAN

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan SDG 2 & 4 (Agustini & Mulyani, 2025) (Ansell & Gash, 2008), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti sebagai investasi sosial strategis yang efektif untuk mengatasi stunting dan malnutrisi kronis (potensi penurunan 2-5%), meningkatkan partisipasi sekolah (15%), dan mendorong pertumbuhan ekonomi (2,54% PDB, 789 ribu lapangan kerja, multiplier Rp1,7). Namun demikian, ada risiko fiskal yang signifikan yang tidak dapat dihindari. Ini termasuk peningkatan anggaran dari Rp71 triliun (2025) menjadi Rp335 triliun (2026), defisit APBN dari 2,29-2,82% PDB, realokasi sektor kesehatan dari 1,87%, dan masalah logistik di wilayah 3T. Tantangan ini juga dapat menyebabkan manfaat jangka panjang menjadi beban anggaran simbolis (INDEF, 2026; CELIOS, 2025).

Untuk mengubah MBG menjadi pendorong pembangunan inklusif berkelanjutan dan bukan hanya ekspansi fiskal, rekomendasi kebijakan seperti redesain menu lokal, digitalisasi monitoring SATUSEHAT, kolaborasi PPP-CSR untuk meningkatkan efisiensi 20%, pendanaan alternatif seperti obligasi hijau dan pajak gula, dan evaluasi berkelanjutan berbasis ROI sosial tiga kali lipat (Ningsih et al., 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. (2025). *Kebijakan peningkatan gizi untuk SDM unggul. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 1-20.
- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). *EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF FREE NUTRITIOUS MEAL*

- PROGRAM POLICY AS AN EDUCATIONAL*. 4, 362–368.
- ANTARA. (2025). *Alokasi anggaran MBG dan tantangan penyerapan dana*. Laporan Kebijakan Nasional.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- CELIOS. (2025). *Makan (tidak) bergizi (tidak) gratis*. Center of Economic and Law Studies.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Galib, R., et al. (2023). Model triple helix untuk ekonomi kreatif daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(3), 200-220.
- Government to add US\$6.2 billion budget for free meals program (2025, 25, January) ANTARANEWShttps://en.antaranews.com/news/342814/government-to-add-us62-billion-budget-for-free-meals-program?utm_source=chatgpt.com
- INDEF. (2026, January 8). Jangan sampai MBG jadi beban fiskal jangka panjang. *Laporan Ekonomi Indonesia*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/indef-jangan-sampai-mbg-jadi-beban-fiskal-jangka-panjang-2105617>
- Lenny Marzulina. (2025). *Stunting dan respons kebijakan MBG*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 20(4), 300-315.
- Ningsih, R., et al. (2021). Keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(2), 112-130.
- Nissa, A., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). *Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Analisis Ekonomi Politik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus : SMP Negeri 4 Tanjungpinang*. 2(June), 33–37.
- Syamsu, R. F., Putry, R. A., & Widyadhana, N. M. (2025). *TINJAUAN NILAI GIZI DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PRESIDEN RI*. 6, 14843–14853.
- Marzulina, L., Mukminin, A., & Harto, K. (2025). *Feeding minds, building dignity: Indonesia's free nutritious meal policy (MBG), barriers, prospects, and policy recommendations*. *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 12(2), 848–856.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/edukasi>
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Putra, A. R., & Sari, M. P. (2024). *Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Pendidikan*, 5(2), 362–368.
- Rahajeng, L., & Manaf, A. (2019). Tantangan kolaborasi lintas sektor di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 78-92.
- Rahmawati, D., & Ramadhan, R. (2024). *Tinjauan nilai gizi program makan bergizi gratis (MBG) Presiden RI*. *Jurnal Kesehatan Terapan*, 6(2), 14843–14853.



- Wicaksono, B., & Nugroho, R. (2024). *Program makan bergizi gratis dan tantangan keberlanjutan fiskal di Indonesia*. Socius: Jurnal Ilmu Sosial, 10(1), 1–15.
- Widyarta, A., & Tama, B. (2022). Kolaborasi pemerintah-bisnis untuk UMKM berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(2), 150-170.